

POSKOTA

No. 14109

HARIAN INDEPENDENT

KAMIS, 2 MARET 2006

3A

POSKOTA

Kamis

2 Maret 2006

persada

Dipertanyakan masyarakat Prabumulih Walikota tersangka korupsi belum ditahan

PALEMBANG, (Poskota) - Belum ditahannya Walikota (Wako) Prabumulih Rahman Jalili oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat sorotan keras dari berbagai masyarakat.

Salah satu elemen masyarakat yang menyoroti hal itu Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-I) yang menilai Kejati Sumsel telah menganggangi Surat izin penahanan yang dikeluarkan oleh Presiden RI.

Ketua Umum FKI-I M Julian Manurung kepada wartawan di Palembang Rabu (2/3) mengatakan tidak ada alasan bagi Kejati untuk tidak mengeluarkan surat status tahanan bagi Wako Prabumulih Rahman Jalili yang menjadi tersangka dalam korupsi.

Pingsannya Rahman Jalili saat diperiksa Tim Penyidik

JPU di Kejati Sumsel baru-baru lalu bukan menjadi alasan bagi pihak Kejati untuk tidak segera mengeluarkan surat penahanan terhadap pejabat ini. "Karena jika hal seperti ini terus berlalu akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan pejabat di daerah lain akan mencontoh Rahman Jalili pingsan saat diperiksa dan akhirnya tidak ditahan," paparnya.

Untuk itu, kata Julian, pihaknya mendesak agar secepatnya pihak Kejati mengeluarkan surat penahanan dan menahan Rahman Jalili. "Jika Kejati tetap tidak melakukan itu perlu dipertanyakan ada apa dengan pihak Kejati?" katanya.

Julian bertekad jika peringatannya tidak diindahkan, maka pihaknya akan melaporkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel Ed-

win P Situmorang ke Kejaksaan Agung.

Rahman Jalili menjadi tersangka korupsi pembebasan lahan kompleks perkantoran dan RSUD Prabumulih yang merugikan negara lebih kurang Rp 4,026 miliar karena adanya pembekakan harga yang tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan didukung adanya alat bukti yang menyatakan Walikota Prabumulih terlibat dan dijadikan tersangka.

Modusnya dengan cara menggelembungkan harga tanah di atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai proyek itu sendiri sebesar Rp 12 miliar namun karena pembekakan, akibatnya negara dirugikan Rp 4,026 miliar kasus ini telah menyeret Wako Prabumulih menjadi tersangka. (hasby)